

Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan: Studi pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan

**Adellia Asfarah Kurniawan¹, Andrea Maharani², Adif Prima Faturrahman³,
Rulinawaty⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: adeliaasfara20@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 14, 2026

Keywords:

Education Policy, Sekolah Rakyat, Educational Equity, Secondary Education, Underprivileged Communities

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Sekolah Rakyat policy as an instrument for educational equity, focusing on Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 in South Tangerang City. The study examines how the policy is implemented at the school level and evaluates its role in expanding access to and sustaining secondary education for students from underprivileged backgrounds. This research employs a qualitative descriptive method using a literature-based approach. The data were obtained from secondary sources, including academic journal articles, reference books, laws and regulations, research reports, and official government documents related to the Sekolah Rakyat policy. The collected data were analyzed qualitatively to identify patterns of policy implementation, implementation challenges, and their implications for educational equity. The findings indicate that the implementation of Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 in South Tangerang City represents an affirmative government effort to ensure access to secondary education for urban low-income communities. The elimination of educational costs plays a significant role in reducing economic barriers that often hinder students' participation in secondary education. In addition, flexible and socially adaptive learning approaches contribute to the creation of an inclusive learning environment that supports educational continuity. Sekolah Rakyat functions not only as a formal educational institution but also as a form of social support that helps students remain within the education system. However, the implementation of this policy still faces challenges related to limited funding, infrastructure, and human resource capacity. Therefore, strengthening policy governance, increasing resource support, and conducting continuous evaluations are essential to optimize the role of Sekolah Rakyat as an effective instrument for achieving educational equity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

ABSTRAK

Article history:

Received January 08, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 14, 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan, Sekolah Rakyat, Pemerataan Pendidikan, Pendidikan Menengah, Masyarakat Kurang Mampu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan, dengan studi pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah serta peran Sekolah Rakyat dalam memperluas akses dan menjaga keberlanjutan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan Sekolah Rakyat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pola implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap pemerataan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk nyata kebijakan afirmatif pemerintah dalam menjamin akses pendidikan menengah bagi masyarakat miskin perkotaan. Pembebasan biaya pendidikan menjadi faktor utama dalam mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan menengah. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial peserta didik berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan pendidikan. Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pendampingan sosial yang membantu peserta didik bertahan dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan dukungan sumber daya, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar Sekolah Rakyat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemerataan pendidikan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Adellia Asfarah Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: adeliaasfara20@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional karena memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, serta ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan publik di bidang

pendidikan (Lukman Hakim, 2025). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan publik dituntut untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Palungan et al., 2025). Dalam konteks pendidikan, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses melalui program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur sekolah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Ketimpangan tersebut tercermin dari perbedaan tingkat partisipasi sekolah antarwilayah, perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta disparitas keberlanjutan pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu (Gafur et al., 2025).

Peserta didik dari keluarga miskin masih menghadapi hambatan ekonomi dan sosial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, sehingga berpotensi mengalami putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pendidikan formal yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan. Tata kelola pemerintahan dan pendidikan kebangsaan memiliki peran penting dalam membentuk perubahan sosial di tengah masyarakat yang majemuk, di mana perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan kondisi ekonomi sering kali memengaruhi relasi antarkelompok. Melalui pendekatan sosio-etnis, pendidikan kebangsaan diarahkan untuk membangun harmonisasi, demokratisasi, dan toleransi sosial (Rajagukguk et al., 2022). Kemudian, ketimpangan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat tidak hanya berpotensi memicu gesekan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada terbatasnya akses pendidikan. Dalam kerangka kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan, sehingga dibutuhkan kebijakan afirmatif yang secara khusus ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal (Indriaty et al., 2025).

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan kebijakan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen pemerataan pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan gratis atau berbiaya sangat rendah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendorong pembelajaran sosial melalui interaksi dan kolaborasi yang berkembang dalam forum diskusi serta proyek bersama, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga penguatan solidaritas sosial dan keterampilan kerja sama (Rulinawaty et al., 2023). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Hadi et al., 2016). Amanat tersebut menuntut kehadiran kebijakan pendidikan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Dalam

konteks inilah Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan hadir sebagai salah satu implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan akses pendidikan menengah bagi masyarakat miskin serta mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan Pendidikan,

Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di tingkat daerah yang dirancang untuk membantu mengatasi hambatan akses pendidikan menengah bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah perkotaan. Program ini secara resmi mulai beroperasi pada 15 Agustus 2025 dengan menampung sekitar 150 peserta didik yang berasal dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Banten, dan seluruh biaya pendidikan serta fasilitasnya dijamin oleh negara. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatif kebijakan tersebut, melainkan juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat operasional. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan Sekolah Rakyat menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini mampu berfungsi sebagai instrumen pemerataan Pendidikan (Agustian et al., 2025).

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan, seperti program wajib belajar, bantuan pendidikan, dan pembangunan sarana prasarana sekolah (Nur Dahyanti et al., 2024). Kebijakan Sekolah Rakyat hadir sebagai kebijakan afirmatif yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan dirancang untuk memberikan layanan pendidikan menengah yang terjangkau, bahkan gratis, bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga berupaya mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah di tingkat menengah. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam upaya pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah perkotaan (Vega et al., 2025). Namun, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di tingkat daerah tentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, kesiapan tenaga pendidik, hingga penerimaan masyarakat terhadap model pendidikan alternatif ini.

Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan diimplementasikan dalam praktik. Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi kebijakan sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan: studi pada sekolah rakyat menengah atas 33 Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan Sekolah Rakyat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memahami implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan, dengan fokus kajian pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan berdasarkan

sumber-sumber tertulis yang tersedia. Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, serta berita resmi pemerintah yang relevan dengan kebijakan Sekolah Rakyat. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, keakuratan, dan kredibilitas informasi yang digunakan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, perbandingan, dan penafsiran untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, tantangan pelaksanaan, serta implikasinya terhadap pemerataan pendidikan. Hasil analisis disusun secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan Kebijakan Sekolah Rakyat, khususnya pada Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan kajian literatur dan dokumen yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan

Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak atas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya pada jenjang pendidikan menengah yang selama ini masih menjadi titik rawan terjadinya putus sekolah. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa mekanisme pendidikan formal yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan dari pendekatan yang bersifat netral menuju pendekatan yang berkeadilan, di mana negara secara aktif memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi tidak setara. Dengan demikian, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya struktural untuk memastikan bahwa pendidikan menengah tidak hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga oleh mereka yang selama ini terpinggirkan. Pelaksanaan kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang secara sistematis dirancang untuk menurunkan hambatan struktural dalam mengakses pendidikan. Pembebasan biaya pendidikan menjadi aspek paling fundamental dalam implementasi kebijakan ini, mengingat faktor ekonomi merupakan penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan menengah di kalangan masyarakat kurang mampu (Musgrave, 2017). Dengan dihilangkannya beban biaya pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan kepastian bagi peserta didik dan keluarganya bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama terhentinya pendidikan.

Selain pembebasan biaya, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat juga ditandai dengan penyediaan fasilitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif, baik dari segi sistem pembelajaran, pendekatan pedagogis, maupun pengelolaan sekolah. Fleksibilitas dalam pengelolaan sekolah menjadi salah satu karakter penting dalam implementasi kebijakan ini, karena peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rentan sering kali memiliki

tantangan tambahan di luar aspek akademik, seperti tekanan ekonomi keluarga dan kondisi sosial lingkungan (Harahap & Junaidi, 2024). Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat juga tercermin dalam upaya pengelola sekolah untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada keberlanjutan partisipasi peserta didik dalam pendidikan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 berperan sebagai ruang perlindungan pendidikan, di mana peserta didik tidak hanya didorong untuk berprestasi, tetapi juga didukung agar tetap bertahan dalam sistem pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Rakyat memiliki dimensi sosial yang kuat, karena berupaya menjaga keberlanjutan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan di tingkat operasional. Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama yang memengaruhi kualitas sarana dan prasarana pendidikan (Hasanah et al., 2024). Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas tenaga pendidik, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 dapat dipahami sebagai proses kebijakan yang bersifat berkelanjutan dan membutuhkan penguatan tata kelola secara terus-menerus. Penguatan tersebut mencakup peningkatan dukungan sumber daya, perbaikan sistem pengelolaan sekolah, serta penguatan koordinasi antarpihak yang terlibat. Apabila implementasi kebijakan ini dapat diperkuat secara konsisten, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi instrumen kebijakan pendidikan yang efektif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mengurangi ketimpangan sosial melalui pendidikan menengah.

B. Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan

Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerataan pendidikan, khususnya dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pemerataan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keadilan dalam distribusi layanan pendidikan. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini menyebabkan pendidikan menengah lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat tertentu. Keberadaan Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi peserta didik dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya dan tekanan ekonomi. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah serta menurunnya potensi putus sekolah. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan bagi peserta didik yang sebelumnya berada pada posisi rentan untuk tetap berada dalam sistem pendidikan formal. Kemudian, Sekolah Rakyat tidak hanya berkontribusi pada pemerataan akses, tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan.

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan cenderung lebih inklusif dan memperhatikan kondisi psikososial peserta didik (Muh Walikram et al., 2025). Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga penguatan karakter dan keterampilan sosial. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang lebih berdaya dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan juga berperan dalam mempersempit kesenjangan pendidikan yang tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari latar belakang sosial dan lingkungan keluarga peserta didik. Banyak peserta didik yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga tidak memiliki dukungan belajar yang memadai di rumah. Dalam kondisi tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang kompensasi pendidikan, di mana sekolah tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga berperan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif kepada peserta didik.

Peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan juga tercermin dari kemampuannya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 memberikan alternatif pendidikan bagi peserta didik yang berpotensi tersisih akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. Dengan adanya sekolah ini, akses pendidikan menengah menjadi lebih terbuka dan tidak lagi didominasi oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai mekanisme inklusi sosial melalui pendidikan. Selain memperluas akses, Sekolah Rakyat juga berperan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik. Pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan masuknya peserta didik ke sekolah, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mereka untuk bertahan dan menyelesaikan pendidikan.

Dalam hal ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 memberikan dukungan yang memungkinkan peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi. Lingkungan sekolah yang lebih suportif membantu peserta didik merasa diterima dan termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan juga memiliki kontribusi dalam menciptakan kesetaraan hasil pendidikan. Meskipun peserta didik berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan cenderung kurang beruntung, Sekolah Rakyat berupaya memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik dan nonakademik secara optimal. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, sehingga kesenjangan capaian pendidikan dapat ditekan secara bertahap (Fauzi, Muhammad Sukron Maq et al., 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan memerlukan kebijakan yang bersifat kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol kebijakan pemerataan, tetapi juga menjadi praktik

nyata dari upaya negara dalam menciptakan keadilan pendidikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak dapat dicapai hanya dengan memperluas jumlah sekolah, tetapi juga dengan menghadirkan model pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Melalui perannya dalam memperluas akses, menjaga keberlanjutan pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, Sekolah Rakyat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan membuka peluang yang lebih setara bagi seluruh peserta didik untuk berkembang.

C. Peran Aktor dan Mekanisme Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat

Keberlangsungan implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi berbagai aktor kebijakan. Implementasi kebijakan ini tidak berdiri secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, pihak sekolah, serta tenaga pendidik sebagai pelaksana di tingkat operasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan serta memastikan ketersediaan dukungan anggaran, sedangkan dinas pendidikan berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kebijakan di tingkat perencanaan dengan pelaksanaan teknis di satuan pendidikan (Antoni et al., 2025).

Di tingkat sekolah, kepala sekolah dan guru memegang posisi kunci sebagai aktor implementor yang secara langsung menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat dijalankan melalui mekanisme yang relatif fleksibel dan kontekstual, khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, adaptasi kurikulum, serta penerapan pendekatan pedagogis yang disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Fleksibilitas tersebut memungkinkan sekolah merespons kebutuhan peserta didik secara lebih inklusif dan berkeadilan. Peran tenaga pendidik dalam kebijakan ini tidak terbatas pada fungsi akademik, tetapi juga mencakup pendampingan sosial dan emosional bagi peserta didik. Kondisi sosial ekonomi peserta didik yang rentan menuntut guru untuk memiliki kepekaan sosial dan kemampuan adaptif dalam mendukung proses belajar (Salamah et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kapasitas aktor pelaksana yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki komitmen sosial yang kuat. Selain itu, mekanisme seleksi peserta didik menjadi aspek krusial dalam memastikan ketepatan sasaran kebijakan. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 menerapkan kriteria seleksi yang menitikberatkan pada kondisi sosial ekonomi calon peserta didik, sehingga kebijakan afirmatif ini benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan mekanisme tersebut, Sekolah Rakyat tidak sekadar berfungsi sebagai alternatif pendidikan, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang secara aktif berupaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan menengah.

D. Dampak Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat terhadap Akses dan Keberlanjutan Pendidikan

Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan menengah bagi masyarakat kurang mampu. Pembebasan biaya pendidikan menjadi faktor utama yang memberikan kepastian bagi peserta didik dan keluarganya bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah sekaligus menekan risiko putus sekolah, khususnya di kalangan peserta didik dari keluarga miskin perkotaan.

Lebih dari sekadar membuka akses, kebijakan Sekolah Rakyat juga berperan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi peserta didik dalam proses pendidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pembelajaran formal, tetapi juga sebagai ruang perlindungan sosial yang menyediakan dukungan psikologis dan sosial. Lingkungan sekolah yang suportif memungkinkan peserta didik tetap bertahan dalam sistem pendidikan meskipun menghadapi tekanan ekonomi, keluarga, maupun sosial di luar sekolah. Dengan demikian, dampak kebijakan ini tidak hanya tercermin pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada kualitas keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Dalam perspektif jangka panjang, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk mendorong peningkatan mobilitas sosial. Akses yang lebih setara terhadap pendidikan menengah membuka peluang bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan Sekolah Rakyat tidak hanya berkontribusi pada pemerataan pendidikan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menghasilkan dampak struktural dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui jalur pendidikan.

E. Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Sekolah Rakyat

Meskipun implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan menunjukkan dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Keterbatasan ini berimplikasi pada kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain aspek anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang signifikan. Jumlah tenaga pendidik yang terbatas serta tuntutan kompetensi yang kompleks baik akademik maupun sosial meningkatkan beban kerja guru (Yahya & Martha, 2025). Peran ganda guru sebagai pendidik dan pendamping sosial memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif, terutama dalam bentuk peningkatan kapasitas profesional, pelatihan berkelanjutan, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Tanpa dukungan tersebut, implementasi kebijakan berisiko berjalan secara kurang optimal.

Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan Sekolah Rakyat memerlukan strategi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup peningkatan

alokasi anggaran, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keselarasan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan penguatan implementasi yang konsisten, Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan dapat semakin berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mengurangi ketimpangan sosial melalui pendidikan menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan menengah bagi masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya peran aktif negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin perkotaan yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi dan sosial dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.

Implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di tingkat sekolah tercermin melalui pembebasan biaya pendidikan serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial peserta didik. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi peserta didik dalam sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 berfungsi sebagai ruang perlindungan pendidikan yang memberikan dukungan akademik dan sosial, sehingga peserta didik dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang lebih setara untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

Namun demikian, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat operasional. Selain itu, tuntutan peran tenaga pendidik yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping sosial, memerlukan dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan Sekolah Rakyat perlu dilakukan melalui peningkatan dukungan sumber daya, perbaikan tata kelola sekolah, serta penguatan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi kebijakan secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pendidikan menengah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.359>

- Antoni, J., Hamengkubuwono, H., Warlizasusi, J., & Fathurrochman, I. (2025). Analisis Perencanaan Strategis Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v12i1.2789>
- Fauzi, Muhammad Sukron Maq, M. M., Rukmini, A., Arsyad, M., Prayogi, A., & Ahyani, E. (2024). Kurikulum Merdeka Dalam Kerangka Akses Pendidikan: Tinjauan Literatur Atas Inisiatif Unicef Dan Pemerintah Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(2).
- Gafur, A., Rahmi, S. H., & Ahmadi, F. (2025). Analisis Kesenjangan Ekonomi Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. *Economica Insight*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v2i1.203>
- Hadi, H., Hafidhuddin, D., Husaini, A., & Mujahidin, E. (2016). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN SEKULER* (Issue 2).
- Harahap, N. I. Y., & Junaidi. (2024). Problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3769>
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya. *PEMA*, 5(2). <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258>
- Lukman Hakim. (2025). Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 33(2).
- Muh Walikram, Z., Nafilata, M., & Septiandini, D. (2025). INTEGRASI COOPERATIVE LEARNING DALAM KURIKULUM MERDEKA: MEWUJUDKAN KELAS YANG AKTIF, INKLUSIF, DAN BERPUSAT PADA SISWA. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2).
- Musgrave, M. dan. (2017). Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi. *Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Nur Dahyanti, Sylvi Marsella Diastami, Azra Humaira, & Tengku Darmansah. (2024). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.545>
- Palungan, H. R., Rulinawaty, R., & Poli, A. I. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kreativitas dan Inovasi Organisasional: Peran Mediasi dan Moderasi Budaya

- Organisasi dan Iklim Inovasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i3.55099>
- Rajagukguk, K. J., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.927>
- Rulinawaty, R., Priyanto, A., Kuncoro, S., Rahmawaty, D., & Wijaya, A. (2023). Massive Open Online Courses (MOOCs) as Catalysts of Change in Education During Unprecedented Times: A Narrative Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 53–63. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9ispecialissue.6697>
- Salamah, I., Darmawan, O., & Ayu, S. M. (2025). Adaptasi Proses Pembelajaran Untuk Siswa Inklusif di Kelas Rendah Sekolah Dasar. *Jurnal Caksana : Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(1). <https://doi.org/10.31326/jcpaud.v8i1.2214>
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2025). KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN: ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN NILAI PANCASILA DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Lentera Ilmu*, 1(2). <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.51>
- Yahya, M., & Martha, A. (2025). Guru Profesional dengan Tantangan Tugas, Fungsi, serta Perannya dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidikan. *JEM: Jurnal Edumatika (Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Matematika)*, 1(2).